

BAB III
ANALISIS HASIL PENELITIAN SOSIALISASI ANGGARAN
RESPONSIF GENDER DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANTUL
OLEH BKKPPKB TAHUN 2010- 2011

Dalam bab ini ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan langsung di lapangan. Analisa dan interpretasi akan dilakukan dengan memaparkan seluruh hasil temu data, variabel-variabel, serta indikator-indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana sosialisasi pelaksanaan Anggaran Responsif Gender di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, khususnya pada kantor BKKPPKB Tahun 2010- 2011. Dimana dalam hal ini, penulis akan membahas beberapa hal yaitu : Pertama, tentang bagaimanana sosialisasi Anggaran Responsif Gender yang telah dilakukan oleh BKKPPKB Kabupaten Bantul, yang kedua terkait Adanya alokasi ARG dalam APBD untuk BKKPPKB Kabupaten Bantul dalam Program/kegiatan di Kantor BKKPPKB tahun 2010-2011. Untuk keperluan penjelasan dalam pembahasan, penulis mengumpulkan data tersebut dengan menggunakan teknik interview atau wawancara, data sekunder, dan dokumentasi.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya, akan disajikan dan dianalisa dengan cara kualitatif, analisa tersebut

berdasarkan kemampuan nalar penulis dalam menghubungkan fakta, data informasi yang ada secara menyeluruh.

1. Sosialisasi Anggaran Responsif Gender Di Pemerintah Kabupaten Bantul oleh BKKPPKB Tahun 2010-2011

Pada dasarnya, secara umum sosialisasi merupakan suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai sebuah proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan, dan bertindak, dimana kesemuanya itu sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif, dimana dalam hal ini sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan, dalam hal ini penulis akan menguraikan hasil penelitian tentang bagaimana sosialisasi pelaksanaan Anggaran Responsif Gender yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Bantul, khususnya di Kantor BKKPPKB Tahun 2010- 2011.

Anggaran responsif gender merupakan pelaksanaan dari pengarusutamaan gender dalam proses penganggaran. Anggaran berbasis gender berarti bahwa perspektif gender telah diterapkan pada setiap tingkat dalam proses penganggaran dan merestrukturisasi pendapatan dan belanja dalam rangka mempromosikan kesetaraan gender.

Anggaran responsive gender bukanlah tujuan tetapi hanyalah sebagai alat analisis yang digunakan untuk mendorong terwujudnya

anggaran yang berpihak kepada masyarakat baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Wacana anggaran responsive gender sampai saat ini belum banyak dipahami sebagai salah satu strategi mengatasi kesenjangan. Demikian pula masih banyak pihak yang menganggap gender itu menunjukkan perempuan dan gender *mainstreaming* sebagai sebuah program. Sebagai ganti, gender budget disebut juga sebagai anggaran responsive gender, anggaran sensitive gender dan anggaran untuk perempuan sebagai sinonim. Gender budget tidak berarti terpisah dengan anggaran untuk perempuan yang tidak terbatas pada target pengalokasian anggaran yang setara atau mempromosikan perempuan, namun meliputi keseluruhan anggaran dan pendapatan.

Alokasi anggaran menunjukkan apa yang menjadi skala prioritas pemerintah, kemudian dari alokasi anggaran juga dapat diketahui seberapa besar perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun kelompok marginal, khususnya perempuan. Asumsi bahwa anggaran diperuntukkan bagi masyarakat secara umum, pasti di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan.

Hal ini seringkali menjadi alasan pembenaran pemerintah untuk tidak memberikan perhatian khusus untuk kelompok-kelompok miskin dan minoritas. Padahal meskipun alokasi anggaran itu diberikan kepada semua orang, namun belum tentu dinikmati dengan kapasitas yang setara dan berdampak yang sama bagi semua orang. Faktanya, dampak yang dirasakan perempuan dan laki-laki dari kebijakan anggaran berbeda,

umumnya pihak perempuan dirugikan dengan kebijakan anggaran yang netral. Oleh sebab itu, alasan utama diperlukannya anggaran responsif gender dimaksudkan untuk memujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sehingga perlu adanya sosialisasi baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk memperhatikan Anggaran yang berbasis gender khususnya dalam pembangunan.

Menurut Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengasurutamaan Gender yaitu ibu Dra. Dwi Ratna S. M.kes, M.Acc. beliau mengatakan :

Untuk dikantor Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Perempuan (BKKPP dan KB) Tahun 2010-2011 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan secara maksimal, karena keterbatasan sumberdaya manusia atau birokrat yang ada dikantor ini dalam memahami tentang materi terhadap Anggaran Responsif Gender tersebut, sehingga perlu adanya peran serta dari pemerintah maupun seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Bantul untuk mengadakan sosialisasi yang lebih mendalam khususnya terkait dengan Anggaran Responsif Gender tersebut.⁴⁵

Selain dari pada itu, menurut hasil wawancara bersama Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengasurutamaan Gender yaitu ibu Dra. Dwi Ratna S. M.kes, M.Acc. beliau mengatakan :

“Pada tataran implementasi di tingkat daerah, anggaran responsif gender belum dapat dilaksanakan secara optimal terutama oleh SKPD sebagai perencana sekaligus pelaksana anggaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya pemahaman tentang anggaran responsif gender di tingkat SKPD. Kedua, belum kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan anggaran responsif gender baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Ketiga, belum tersedianya payung hukum

⁴⁵Wawancara oleh sub bidang pengembangan partisipasi perempuan dan pengasurutamaan gender Kab.Bantul Tanggal 14 Januari 2013 Pukul 12.00 WIB

bagi implementasi pengarusutamaan gender termasuk perencanaan penganggaran responsif gender dalam program dan kegiatan SKPD.⁴⁶

Dari pernyataan diatas, khusus di BKKPPKB Kabupaten bantul sendiri, telah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap masing- masing individu yang terlibat dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar dapat menjalankan kegiatan/program dengan baik.

Adapun Sosialisasi yang dilakukan di Kantor BKKPPKB dalam pelaksanaan Anggaran yang berbasis Gender yaitu dengan melakukan sosialisasi yang dilaksanakan berupa pertemuan, rapat kerja, seminar dan workshop, sehingga para birokrat bisa ikut berpartisipasi dalam sosiaalisasi kegiatan/program terhadap ARG.

Berikut uraian program-program sosialisasi yang telah dilakukan oleh BKK PP KB dalam Anggaran Responsif Gender yaitu :

1.1 Advokasi dan Fasilitasi Pengarusutamaa Gender Dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Di SKPD.

Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender ini diselenggarakan dengan sasaran pejabat eselon IV yang menangani perencanaan program agar lebih mampu memahami serta mengimplementasikan dalam program dan kegiatan yang responsif gender di SKPD masing-masing.

⁴⁶Wawancara oleh sub bidang pengembangan partisipasi perempuan dan pengarusutamaan gender Kab. Bantul Tanggal 14 Januari 2013 Bukul 12.00 WIB

Pelaksanaan sosialisasi tentang Advokasi dan Fasilitasi Pengarusutamaa Gender Dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Di SKPD ini bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan penganggaran pembangunan di daerah. Selain itu, untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang ARG kepada SKPD terutama perencana program, dan untuk menyusun rencana tindak lanjut implementasi ARG dalam perencanaan program SKPD.

Adapun Output yang ingin dicapai dalam kegiatan Advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan gender dalam perencanaan penganggaran responsif Gender di SKPD ini yaitu adanya gambaran mengenai implementasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan penganggaran di Kabupaten Bantul, selain itu adanya peningkatan pemahaman para perencana program di SKPD tentang ARG, dan adanya rencana tindaklanjut untuk implementasi responsif gender di SKPD.

Pelaksanaan Advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender bagi perempuan untuk perencanaan penganggaran responsif gender di SKPD dilaksanakan di Gedung Induk lantai 3 sayap timur kompleks Parasmya Bantul, pada hari rabu tanggal 9 mei 2011 mulaijam 08.00 wib sampai dengan selesai. Peserta atau audience yang ikut berpartisipasi Pada kegiatan tersebut berjumlah 40 orang yang terdiri dari bagian perencana program SKPD Kabupaten Bantul.

1.2. Workshop sinkronisasi Penyusunan RKA SKPD Responsif Gender untuk Perencana Program

Kegiatan workshop sinkronisasi penyusunan RKA SKPD responsif gender ini, diselenggarakan agar semua pihak yang berkepentingan lebih mampu memahami serta mengimplementasikan dalam program dan kegiatan yang responsif gender. Pelaksanaan workshop sinkronisasi penyusunan RKA SKPD responsif gender ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang mekanisme perencanaan dan Menyusun perencanaan penganggaran yang responsif gender dalam RKA SKPD.⁴⁷

Adapun Output yang ingin dicapai dalam kegiatan workshop sinkronisasi penyusunan RKA SKPD responsif gender yaitu, tercapainya pemahaman yang mendalam tentang mekanisme perencanaan sinkronisasi Penyusunan RKA SKPD Responsif Gender pada Perencana Program penganggaran responsif gender dalam RKA SKPD.

Pelaksanaan workshop sinkronisasi penyusunan RKA SKPD responsif gender ini dilaksanakan selama 2 hari di Gedung Induk lantai 3 sayap timur kompleks Parasamya Bantul, pada hari jum'at tanggal 21-22 juni 2011 mulai jam 08.00 wib sampai dengan selesai. Peserta atau audience yang ikut berpartisipasi Pada kegiatan tersebut berjumlah 42

⁴⁷Hasil wawancara sub bidang pengembangan partisipasi perempuan dan pengarusutamaan gender Kab.Bantul Tanggal 14 Januari 2013 Pukul 12.00 WIB

orang yang terdiri dari bagian perencana program SKPD di seluruh Kabupaten Bantul.

1.3. Pendampingan Penyusunan Program/Kegiatan SKPD Responsif Gender untuk Perencana Program pada bidang/Sub Bagian

Kegiatan pelatihan terhadap Pendampingan Penyusunan Program/Kegiatan SKPD Responsif Gender untuk Perencana Program pada bidang/Sub Bagian ini, diselenggarakan agar semua pihak yang berkepentingan lebih mampu memahami serta dapat mengimplementasikan penyusunan program/kegiatan SKPD yang responsif gender. Pelaksanaan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang mekanisme perencanaan anggaran responsif gender kepada SKPD terutama Perencana program/kegiatan yang bersangkutan. Serta dapat melakukan penyusunan program/kegiatan SKPD yang responsif gender.

Adapun Output yang ingin dicapai pada pelatihan Pendampingan penyusunan program/kegiatan SKPD responsif gender untuk perencana program pada bidang/sub bagian ini yaitu tercapainya pemahaman yang utuh tentang mekanisme perencanaan anggaran responsif gender kepada SKPD terutama perencana program, dan tersusunya program/kegiatan SKPD yang responsif gender

Pelaksanaan pelatihan penyusunan program/kegiatan SKPD responsif gender untuk perencana program pada bidang/sub bagian dilaksanakan di Gedung Induk lantai 3 sayap timur kompleks parasamy Bantul, pada hari senin sampai dengan kamis tanggal 25 s/d 28 maret 2011 mulai jam 08.00 wib sampai dengan selesai. Peserta atau audience yang mengikuti pelatihan tersebut berjumlah 45 orang, yang terdiri dari perencana program per bidang/sub bidang di seuruh SKPD Kabupaten Bantul.⁴⁸

1.4. Rakor Integrasi Anggaran Responsif Gender dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

Kegiatan Rakor tentang Integrasi Anggaran Responsif Gender dalam Perencanaan dan Pembangunan Daerah diselenggarakan agar semua pihak yang berkepentingan lebih mampu memahami tentang pengintegrasian program dan kegiatan yang responsif gender dalam penganggaran pembangunan daerah yang mulai dilaksanakan.

Pelaksanaan integrasi anggaran responsif gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang mekanisme perencanaan penganggaran responsif gender kepada TAPD. Selain itu, untuk menyusun perencanaan penganggaran yang responsif gender dalam RKA SKPD, serta mampu mengawal pelaksanaan penganggaran responsif gender.

⁴⁸Wawancara oleh sub bidang pengembangan partisipasi perempuan dan pengarusutamaan gender Kab.Bantul Tanggal 14 Januari 2013 Pukul 12.00 WIB

Adapun output yang ingin dicapai pada kegiatan Rakorintegrasi anggaran responsif gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah ini yaitu meningkatnya pemahaman tentang mekanisme perencanaan penganggaran responsif gender pada TAPD, selain itu agar dapat tersusunya perencanaan penganggaran yang responsif gender dalam RKA SKPD, dan terlaksananya penganggaran responsif gender.

Pelaksanaan Rakor integrasi anggaran responsif gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah ini di laksanakan Gedung Induk lantai 3 sayap barat kompleks parasarnya Bantul, pada hari senin 26 November 2011 mulai jam 08.00 wib sampai dengan selesai. Peserta atau audience yang mengikuti Rakor tersebut berjumlah 40 orang, yang terdiri dari semua kompen TAPD Kabupaten Bantul ditambah Inspektorat Daerah dan unsur BKKPPKB.

1.5. Penyusunan Peraturan Bupati Bantul Tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Bantul (dalam proses penandatanganan).

Kegiatan rapat kerja tentang penyusunan peraturan Bupati Bantul tentang pedoman perencanaan dan penganggaran responsif gender di Kabupaten Bantul Dalam menyusun penganggaran yang responsif gender disesuaikan dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Petunjuk dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah dan Penyusunan, Penelaahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang diikuti oleh SKPD yang ada di Kabupaten Bantul pada tanggal 29 November 2011.⁴⁹

Beberapa alasan yang melatarbelakangi penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, adalah :

Pertama, mengurangi diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan penerima manfaat dari pelaksanaan pelayanan publik.

Kedua, memberikan cakrawala baru bagi perencana untuk menerapkan prinsip-prinsip ARG dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran(RKA). Hal itu menjadi dasar dan alat untuk melakukan perubahan dalam kebijakan anggaran yang efisien, efektif, dan adil bagi semua masyarakat sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Ketiga, memperbaiki posisi laki-laki dan perempuan yang belum seimbang, seperti kemiskinan struktural, kesenjangan gender bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, sistem nilai dan budaya yang belum berubah, konflik sosial yang merugikan perempuan, dan masalah perdagangan manusia, serta permainan media yang menempatkan perempuan sebagai komoditi yang tentunya sangat merugikan perempuan.

⁴⁹Wawancara oleh sub bidang pengembangan partisipasi perempuan dan pengarusutamaan

Keempat, mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan Peraturan Bupati Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 yang secara jelas mengamanatkan penerapan prinsip-prinsip ARG dalam penyusunan, perencanaan, dan penganggaran diberbagai bidang pembangunan.

Kelima, agar pelayanan publik lebih tepat sasaran dan efektif. Penggunaan analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran, dapat memetakan peran laki-laki dan perempuan, kondisi laki-laki dan perempuan, serta kebutuhan laki-laki dan perempuan. Dengan menggunakan strategi ini dapat didiagnosis dan ditemukan jawaban yang lebih tepat terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki, serta untuk mengurangi kesenjangan gender pada tingkat penerima manfaat.

Berbagai Proses sosialisasi yang telah dijelaskan diatas, tidak terlepas dari dukungan seluruh SKPD se Kabupaten bantul, lembaga swadaya masyarakat(LSM) maupun akademisi serta pemangku kebijakan yang telah berpartisipasi dalam pensosialisasian Anggaran yang Berbasis Gender yang dilakukan oleh BKKPPKB khususnya pada bidang pemberdayaan partisipasi perempuan dan pengarusutamaan gender Kabupaten Bantul yang bekerja sama dengan sub bidang pengembangan, dalam mensosialisasikan ARG. pada proses sosialisasi program/kegiatan yang telah dilakukan, akan ditindak lanjuti kembali dengan pertemuan berkala yaitu setiap tiga bulan sekali agar proses pelatihan dan

sosialisasi terhadap Anggaran Responsif Gender dapat berjalan dengan baik .

Kemudian dari pada itu, adanya keputusan kepala BKKPPKB di Kabupaten Bantul Tahun 2011 yang menetapkan tentang penetapan koordinasi focal point pengarusutamaan gender oleh kepala BKKPPKB, agar focal point yang telah dibuat benar-benar dapat dilaksanakan dan direalisasikan untuk mensosialisasikan pengarusutamaan gender kepada semua staf di masing-masing SKPD.

Menurut Sub Bidang Pengembangan partisipasi perempuan dan pengarusutamaan Gender yaitu ibu Dra. Dwi Ratna S, M.kes, M.Acc.untuk focal point tentang pengarusutamaan gender di Kabupaten Bantul masih kurang 2 SKPD yang belum memiliki focal point tersebut dari 41 dinas/badan/kantor/bagian organisasi dan pemerintah Desa, sehingga untuk SKPD yang belum memiliki focal point untuk segera membuatnya.⁵⁰

Adapun Pelaksanaan Program/kegiatan di Kantor Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana(BKKPPKB) kabupaten Bantul Tahun 2010-2011 Untuk menginternalisasikan anggaran Responsif Gender antarlain :

1. Program penguatan kelembagaan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak

⁵⁰Hasil Wawancara oleh sub bidang pengembangan partisipasi perempuan dan pengarusutamaan gender Kab.Bantul tanggal 14 Januari 2013, pukul 12.00 WIB.

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
yaitu :

- a) Sosialisasi dan Advokasi kebijakan penghapusan buta Aksara perempuan(PBAP)
- b) Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak yaitu :

- a) Pemberdayaan lembaga yang berbasis Gender
- b) Sarasehan pemberdayaan perempuan

4. Program Keluarga Berencana yaitu :

- a) Pembinaan Keluarga Berencana
- b) pendampingan Kegiatan Hargana xvi

5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja yaitu :

- a)Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

6. Program penyiapan Tenaga Pendamping kelompok bina keluarga

- a) Pengembangan ADITUKA(Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)

- b) Fasilitas kegiatan pengembangan program posyada

7. Program Pengembangan Model Operasional BKB- Posyandu+ PADU

Berdasarkan kegiatan/program yang tertera diatas, maka dalam hal ini, BKKBBPK dalam melakukan kegiatan/program untuk menginternasiasikan Anggaran Responsif Gender, di BKKPPKB, dimana Kegiatan/program yang dilakukan yaitu mengadakan Pertemuan Triwulan bagi perecana program untuk menyusun kegiatan/program yang telah dianalisis gender untuk perencanaan penganggaran tahun berikutnya. Selain itu, dilakukan juga melalui pendekatan ke Bappeda dan DPPKAD agar dalam surat edaran penyusun penganggaran rencana kegiatan SKPD, termasuk Anggaran Responsif Gender didalamnya.

Namun, dalam hal ini BKKPPKB Kabupaten Bantul memiliki sumberdaya manusia yang terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional (PL KB) serta non fungsional yang merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan bidang BKKPPKB Kabupaten Bantul. Namun, perlu disadari, bahwa kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang tersedia masih perlu dikembangkan dan ditambah sehingga dapat melaksanakan kebijakan dan program pembangunan secara optimal.

Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul memiliki sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu disetiap unit kerja dimana sarana prasarana ini juga memiliki peranan yang cukup menentukan dalam pelaksanaan

kebijakan dan program pembangunan di bidang Kesejahteraan dan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Secara Kuantitas dan kualitas sarana dan pra sarana kebijakan dan program pembangunan tersebut belum dapat di capai secara optimal, yang ada gilirannya dapat dicapai secara optimal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

1.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi Sosialisasi Anggaran Responsif Gender di BKKPPKB Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011

Dalam sosialisasi anggaran responsif gender di Kantor BKKPPKB kabupaten Bantul Tahun 2010-2011. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat maupun faktor pendukung, berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Bidang pengembangan partisipasi perempuan dan pengarusutamaan gender, yaitu Dra. Dwi Ratna S, M.Kes.,M.Acc. terdapat beberapa faktor penghambat maupun pendukung Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana antara lain

1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat disini yaitu terdapatnya halangan-halangan yang terjadi atau sebagai titik kelemahan dalam proses kegiatannya terhadap sosialisasi pelaksanaan ARG di Kantor Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana yaitu:

a. Komitmen Politik .

Belum ada pedoman/Juklak atau bJuknisPUG/PPRG/PKDRT untuk skala lokal, Focal Point masih kurang² SKPD dari 41 dinas/badan/kantor/Bagian → Bag. Org & Pemerintah desa , dan masih ditemukan kesalahpahaman dalam penerapan peraturan tentang PUG dan ARG.⁵²

b. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan salah satu hal penting dalam suatu pengimplementasian yang terkait dengan kebijakan, program maupun kegiatan pada instansi pemerintahan yang terkait. Sumber daya manusia sangat mempengaruhi pada implementasi kebijakan yang terdiri dari stafnya sendiri . Terkait dengan sumberdaya manusia yang ada di kantor BKKPPKB yaitu salah satunya disebabkan oleh sumberdaya manusia seperti staf/pegawai yang kurang memadai terhadap Kurangnya pemahaman tentang pengarusutamaan gender (PUG)/PPRG termasuk jajaran pejabat yang diimplementasi dalam dokumen penganggaran/SIMDA, selain itu forum, tim dan kelompok kegiatan yang

⁵²ibid

telah terbentuk belum dapat berjalan secara optimal, dikarenakan adanya Mutasi pegawai.⁵³

c. System data dan informasi

System dan data informasi merupakan point yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan/program terhadap pelaksanaan Anggaran Responsif Gender. Dalam hal ini, Pendekatan pengarusutamaan gender melalui Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Responsif Gender yang didahului dengan analisis gender akan memberi manfaat bagi pemenuhan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara. Dengan melakukan analisis gender, maka perencanaan dan penganggaran akan:

a. Lebih efektif dan efisien

Pada analisis situasi atau analisis gender dilakukan pemetaan laki-laki dan perempuan, kondisi laki-laki dan perempuan, kebutuhan laki-laki dan perempuan serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Anggaran menetapkan affirmative action apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya menjadi target sasaran dari sebuah program atau kegiatan, kapan dan bagaimana program atau kegiatan akan dilakukan.

b. Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan

Dengan menerapkan analisis situasi atau analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalisir. Analisis situasi atau analisis gender akan dapat mengidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, dan dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan kebutuhan yang berbeda tersebut.

System dan informasi terhadap sosialisasi pelaksanaan anggaran responsif gender di BKKBBKB perlu adanya pembagian data terpilah yang terkait dengan Anggaran responsif gender. Data terpilah merupakan hal yang penting untuk mengidentifikasi masalah dan dapat diperinci menurut jenis kelamin, wilayah, status ekonomi, waktu, yang dalam analisisnya menggunakan analisis gender. Bentuk data terpilah bisa kualitatif bisa kuantitatif⁵⁴. Dari data terpilah tersebut akan dapat diketahui posisi, kondisi serta kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Dimana dalam hal ini, menurut ibu Dra. Dwi Ratna S.M. kes, M.Acc menjelaskan bahwasanya, system dan informasi masih mengalami suatu hambatan dalam proses pelaksanaan Anggaran Responsif Gender di BKKPPKB Kabupaten

Bantul. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya data terpilah yang belum tersedia, dan tidak semua satuan perangkat daerah(SKPD) juga memiliki data pilah terhadap Gender tersebut, sehingga proses pelaksanaannya belum dapat dicapai secara maksimal.⁵⁵

d. Jika dilihat pada faktor struktural dimana dalam hal ini kapasitas birokrasinya sendiri, masih terdapat ketidakpahaman dari beberapa birokrat tentang sosialisasi serta pengimplementasian Anggaran Responsif Gender yang kurang tepat sasaran, sehingga proses sosialisasinya kurang maksimal, disamping itu juga sebagian satuan pwrangkat kerja daerah (SKPD) dalam hal ini masih kurang memahami anggaran yang berbasis Gender, sehingga perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan terhadap Anggaran responsif gender, sehingga nantinya kegiatan/ program yang dilaksanakan memang benar- benar sesuai dan tepat sasaran.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung disini yaitu dapat diartikan sebagai pendorong atau kekuatan yang ada di Kantor BKKPPKB dalam sosialisasi pelaksanaan Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Bantul diantaranya :

a) Adanya peraturan Bupati(perbub) pedoman umum PUG no 34/2012 tanggal 30 mei tahun 2012 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG dalam pembangunan, selain itu juga adanya permedgri no.15 tahun 2008 yang telah disempurnakan kedalam peremendagri nomor 67 tahun

2011 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan Gender di daerah, dan untuk provinsi daerah istimewa Yogyakarta, terdapatnya surat edaran gubernur No.463/0494 tertanggal 17 Februari 2010, yang mana dalam kebijakan ini, menegaskan dan menguatkan komitmen pemerintah provinsi untuk mengimplementasikan anggaran responsif gender, agar sosialisasi dan pelaksanaan Anggaran Responsif Gender tersebut dapat berjalan dan mencapai hasil yang optimal.

b) Adanya Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang sudah mulai memperhatikan masalah Anggaran Responsif Gender dalam merencanakan dan menyusun kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang responsif gender terhadap dinamika pemerintahan di Provinsi DIY khususnya.

c) Adanya surat Edaran bupati No. 910/3298 tanggal 28 Agustus 2012 tentang pedoman RKA SKPD Tahun 2013. serta adanya RAD pengarusutamaan Gender yang telah ada.

d) adanya antusiasme dari pemerintah pusat maupun daerah serta para peserta pada setiap kegiatan khususnya mengenai Anggaran yang Berbasis

2.Adanya Alokasi PUG dalam APBD untuk BKKPPKB Kabupaten Bantul

Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi menuju tercapainya kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu dari 7(tujuh) tujuan MDG's (Millennium Development Goals). Komitmen pemerintah tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 yang telah pula diturunkan dalam Kepmendagri No. 132 tahun 2003 dan perubahannya dalam Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Lebih jelas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah yang menekankan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender. Anggaran responsif gender harus di terapkan pada penganggaran tahun 2013.

Hal ini dikuatkan oleh Kemkeu dengan menetapkan PMK Nomor 03/PMK/02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. PMK ini merupakan dasar penerapan ARG untuk T.A. 2012 dan tahun selanjutnya, karena masa berlakunya yang tidak hanya satu tahun, sebagaimana PMK sebelumnya. Untuk T.A. 2012, ARG tersebut direncanakan akan diterapkan di 28 kementerian/lembaga dan 10 provinsi(yaitu: Jatim, Jateng, DIY, Banten, Jabar, Sumut, Babel, Kepri, Kalbar, dan Lampung).

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender.

ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan (keadilan dan kesetaraan gender). ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender, tapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD dan sebagai penjabaran dari Renja SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran diperlukan untuk melaksanakannya. Revisi dengan ARG perlu diteliti relevansi dan

konsistensi dokumen Gender Budget Statement (GBS) dengan TOR oleh SKPD yang memiliki kewenangan.

Pada tataran implementasi di tingkat daerah, anggaran responsif gender belum dapat dilaksanakan secara optimal terutama oleh SKPD sebagai perencana sekaligus pelaksana anggaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya pemahaman tentang anggaran responsif gender di tingkat SKPD. Kedua, belum kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan anggaran responsif gender baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Ketiga, belum tersedianya payung hukum bagi implementasi pengarusutamaan gender termasuk perencanaan penganggaran responsif gender dalam program dan kegiatan SKPD. Untuk alokasi dana dari APBD kabupaten Bantul sendiri pada tahun 2011 sebesar Rp.1.159.047.061.158,00 . sedangkan untuk alokasi dana yang diberikan untuk Anggaran responsif gender di BKKPPKB Kabupaten Bantul sebesar Rp.2. 156.630.700,00 dalam menjalankan kegiatan/program yang ada pada instansi tersebut.

Adapun program-program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan antara lain:

Tabel 3.1

No	Program	Kegiatan	Alokasi Dana	Ket
1.	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan	a. Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara (PBAP) b. Sosialisasi sistem pencatatan sipil dan pelaporan KDRT	Rp. 25.000.000	APBD
2.	Penguatan kelembagaan PUG gender dan anak	Mengadakan sosialisasi kelembagaan gender dan anak	Rp. 20.000.000	
3.	Program peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan	Pembinaan organisasi perempuan	Rp. 15.000.000	
4.	Penguatan program kelembagaan PUG dan anak	a. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender b. Sarasehan pemberdayaan perempuan	Rp. 35.000.000	

Pada SKPD yang ada di Kabupaten Bantul telah mendapatkan dana untuk alokasi terhadap penggunaan pada kegiatan/program yang berbasis gender, tetapi Pemahaman pejabat di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap pengalokasian dana dan pengarusutamaan gender (PUG) masih kurang. Kepala BKKPPKB Bantul, Djoko Sulasno mengungkapkan, selama 2011, program-program PUG sudah banyak dilakukan. Namun dari segi hasil belum terlihat memuaskan. Program-program tersebut pun dinilai masih kurang optimal, hal ini terjadi, karena para penyelenggara belum

memahami cara mengintegrasikan perspektif gender dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran. Permasalahan utamanya adalah masih banyak program dan kegiatan yang disusun tanpa menggunakan data terpilah, penentuan indikator kinerja masih belum terukur, dan pelaporan kinerja.

Banyak program yang sudah terlaksana tetapi dampak dan keberhasilannya masih perlu ditingkatkan lagi, karena anggaran responsif gender merupakan hal baru dan tidak sedikit pihak-pihak yang masih memiliki pemahaman miring terhadap hal ini. Maka perlu adanya *Gender Budget Statement*(GBS) untuk melihat suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, atau untuk melihat suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Komitmen dari SKPD untuk melaksanakan ARG Di Indonesia. Advokasi dengan pejabat di semua SKPD yang ada untuk *me-refresh* kembali agar program 2013 bisa lebih berdampak pada responsif gender. Djoko mengungkapkan, saat ini di semua SKPD telah mengalokasikan dana untuk program Pengarusutamaan Gender(PUG). Hanya saja penggunaan anggaran tersebut dinilai belum begitu tepat sasaran. Hal itu salah satunya dikarenakan pejabat di SKPD terkait masih kurang memahami sepenuhnya tentang permasalahan tersebut. Pergantian pejabat yang menangani program tersebut juga sering menyulitkan pengoptimalan program pemerintah baik baik baik baik maupun perempuan menjadi

kewajiban pemerintah untuk memenuhi gender. Pemenuhan tersebut bisa dilakukan oleh berbagai dinas yang ada. Kebijakan di suatu dinas bisa jadi membawa implikasi lain di luar tugas dinas itu. Oleh karena itu untuk pejabat di SKPD terkait untuk sama-sama berperan merumuskan kebijakan dan program yang responsif gender.⁵⁶

⁵⁶ wawancara oleh kepala badan BKKPKB Kabupaten Bantul